

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi-vii
ABSTRAK.....	viii-ix
DAFTAR ISI.....	x-xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii-xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1-14
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14-15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	15
1.5.1 Tipe Penelitian.....	15-16
1.5.2 Pendekatan Masalah	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.5.5 Analisa Bahan Hukum.....	17

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	
.....	17-18
BAB II KEABSAHAN PERMENKUMHAM NOMOR 22/2018	19
A. Keabsahan Permenkumham Nomor 22/2018.....	19
a. Wewenang.....	19-24
b. Substansi	24-34
c. Prosedur	34-36
B. Akibat Hukum Permenkumham Nomor 22/2018	36-42
BAB III BATASAN WEWENANG KEMENKUMHAM MELAKUKAN	
HARMONISASI PERATURAN DAERAH	43
A. Pembagian Wewenang Antara KEMENKUMHAM dan KEMENDAGRI	
.....	43
1. Wewenang Kemenkumham	43-51
2. Wewenang Kemendagri dalam pembentukan produk hukum daerah.	
.....	51-58
B. Analisis batasan wewenang harmonisasi PERDA oleh	
KEMENKUMHAM.....	58-63
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR BACAAN.....	66-67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wewenang Kemenkumham berdasarkan UU No 12/2011

Tabel 2.1 Wewenang Kemenkumham berdasarkan UU No 15/2019

Tabel 3.1 Wewenang Kemenkumham berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

Tabel 4.1 Wewenang pembentukan produk hukum daerah oleh Kemendagri

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 189 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133)